

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbicara perihal kedaulatan rakyat memang erat berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan yakni pelaksanaan demokrasi. Pada perkembangannya, muncul berbagai teori tentang kedaulatan rakyat ini yang merujuk kepada proses perubahan dalam pemerintahan itu sendiri. Kedaulatan rakyat ini sangat penting bagi landasan atau pondasi utama untuk menelaah bagaimana proses perubahan dalam pemerintahan melalui kegiatan seperti pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat dimana lazimnya disebut demokrasi.

Barangkali sudah jelas bahwa demokrasi merupakan kekuasaan yang dipegang secara penuh oleh rakyat. Demokrasi juga dianggap salah satu bentuk pemerintahan suatu negara, beberapa negara di dunia menganut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan negaranya. Pemerintahan yang demokratis memerlukan nilai-nilai demokrasi untuk mengembangkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan nilai-nilai inilah kestabilan kondisi pemerintahan dapat ditegakkan. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain, kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang lain/kelompok lain, kerjasama, kesetaraan, persaingan dan kepercayaan.

Demokrasi mencakup banyak hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi yang menerapkan atau memungkinkan adanya kebebasan berpolitik secara setara dan bebas bagi rakyat. Artinya rakyat diperbolehkan untuk mengatur dan ikut andil dalam urusan pemerintahan di negaranya masing-masing. Dalam hal ini tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik dari pemerintah maupun dari orang lain. Karena pada praktiknya, proses demokrasi ini mengarah kepada pilihan hati nurani rakyat itu sendiri, rakyat bebas untuk memilih dan menentukan pilihannya. Seperti apa yang dikemukakan oleh John L. Esposito bahwa pada dasarnya kekuasaan dari

rakyat dan untuk rakyat. Oleh karenanya semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Demokrasi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena sejak masa lampau nilai-nilai demokrasi sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi juga merupakan bentuk nyata penghormatan atau penerapan dalam kedaulatan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Ali Moertopo bahwa Pemilu pada hakekatnya merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktb dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pemilihan umum, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif, pemilukada, sampai tingkat paling rendah yakni pemilihan kepala desa nilai-nilai demokrasi wajib dijunjung setinggi-tingginya dan menjadi landasan pokok.

Salah satu asas pokok dalam demokrasi adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat ataupun pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan bupati hingga pemilihan kepala desa. Dalam perkembangannya, pemerintahan demokratis mempunyai suatu tatanan dan dipakai oleh hampir seluruh rakyat di dunia.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, proses pelaksanaan pemilu atau lazimnya disebut coblosan merupakan langkah atau cara yang digunakan untuk memilih wakil rakyat di lembaga pemerintahan yang telah ditentukan. Setiap beberapa periode yang telah ditentukan, suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan mengadakan pemilu untuk memilih dan menentukan pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini juga bertujuan untuk menggantikan pemimpin atau wakil rakyat yang dahulu dan digantikan oleh yang baru. Pergantian kepemimpinan di pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat dan suatu organisasi sudah biasa terjadi. Hal ini bukan menjadi rahasia publik, karena setiap orang di negara ini barangkali sudah tahu dan sudah paham akan fenomena dalam dunia politik tersebut.

Pemilu di Indonesia telah melahirkan berbagai macam karakteristik dan peninggalan-peninggalan yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pedoman bagi pemerintahan di masa mendatang tetapi juga pemerintahan terdahulu kadang menimbulkan persoalan yang hingga sekarang masih membekas. Karena dalam proses dan tata caranya biasanya menggunakan cara-cara yang tidak bersih yang dapat merusak asas pemilu yang “*luber jurdil*” yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lain halnya pemilu untuk menentukan siapa yang bakal berkuasa di pemerintahan lain pula pemilihan kepala daerah yang ada di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala daerah tingkat provinsi (gubernur), pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kotamadya (bupati/walikota) hingga pemilihan kepala daerah di tingkat desa atau lazim disebut Pilkades. Semua mempunyai tata cara dan aturan masing-masing. Bahkan strategi pemenangan calon yang akan maju dalam pemilu/pilkada dari tingkat pusat hingga daerah sangatlah berbeda.

Tahun 2019 bakal dinanti-nantikan bagi masyarakat Indonesia menentukan pemimpin dan wakil mereka yang baru di pemerintahan melalui pemilihan umum atau pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan tanpa pengecualian juga di sebagian daerah di Indonesia juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah bahkan hingga pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa dalam aturan dan konsepnya tentunya hampir sama dengan konsep dan aturan pemilu yang telah diatur dalam undang-undang. Beberapa hal yang membedakan antara pemilu dan pilkades ialah jangka waktu pemilihan dan penyelenggara. Jika pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali maka pilkades dilaksanakan setiap 6 tahun sekali.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa idealnya bertujuan untuk membantu masyarakat desa atau bisa juga digunakan sebagai wadah menyalurkan hak pilih dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Tetapi pada kenyataannya ajang pemilihan kepala desa biasanya digunakan sebagai ajang pembuktian siapa yang paling kuat antara

calon kepala desa. Bahkan masyarakat sampai ada yang terpecah belah karena berbeda pilihan. Tentunya ini sangat tidak diharapkan tetapi masyarakat sudah terlanjur terpaku dalam pikirannya bahwa siapa yang paling kuat dukungannya maka dia yang akan memenangkan pilkades.

Fenomena strategi pemenangan pilkades juga menarik untuk dibahas. Dari realita dan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai strategi pemenangan kepala desa dalam pilkades, tentunya setiap calon kepala desa akan menyiapkan berbagai strategi politik. Diantara beberapa strategi tersebut yang paling lazim terjadi di pilkades ialah kekerabatan dan politik uang. Terkhusus fenomena politik uang diharapkan mampu untuk membeli suara rakyat dan juga menarik simpati rakyat. Namun cara ini adalah cara yang tidak tepat dan cara yang tidak dibenarkan.

Berangkat dari fenomena politik uang masyarakat harusnya sadar bahwa suara mereka harusnya tidak bisa dibeli segampang itu, karena hak mereka untuk memilih sesuai hati nurani telah terampas oleh politik uang. Apabila ini terus terjadi di masyarakat kita maka selamanya kita tidak akan pernah merasakan pemilu atau pilkades yang bersih dan jujur dan pada akhirnya dapat memudarkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya bisa dijunjung tinggi.

Strategi pemenangan ini digunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dan memenangkan dirinya dalam pilkades. Banyak cara yang dilakukan agar kemenangan dapat direalisasikan, selain dengan politik uang, masih ada cara-cara yang lain untuk memenangkan pilkades.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, calon kepala desa juga termasuk masyarakat umum, barangkali mereka juga sudah memahami akan seluk beluk tentang pilkades. Mereka tahu mereka harus bagaimana dan strategi apa supaya masyarakat ini dapat tertarik untuk memilihnya. Pada umumnya, yang paling penting dan harus dilakukan oleh setiap calon kepala desa yaitu penyampaian visi misi, apa yang akan dikerjakan dan diterapkan dalam pemerintahan desa apabila mereka terpilih nanti.

Selanjutnya bergantung bagaimana cara atau strategi calon kepala desa tadi bisa mendekati dan meraih hati masyarakat supaya mendapatkan simpati masyarakat. Pendekatan terhadap masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara juga diantaranya melalui kegiatan kemasyarakatan dan melalui kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan secara perlahan-lahan dan bertahap, artinya si calon kepala desa tidak harus terburu-buru untuk langsung menyatakan secara terang-terangan jika ingin mencari dukungan kepada masyarakat.

Dari fenomena pilkades yang terdahulu dapat dilihat bahwa siapa (calon kepala desa) yang bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat yang baik dan dapat menggunakan strategi berpolitik merekalah yang dapat memenangkan pilkades. Bukan serta merta hanya mengandalkan uang dan banyak sokongan, tetapi berbaur dengan masyarakat itulah yang paling utama. Karena dikemudian hari ketika mereka sudah dilantik menjadi kepala desa, mereka akan hidup berdampingan dengan masyarakat.

Selain fenomena strategi pemenangan pilkades, ada satu hal lagi yang berkaitan dengan pilkades yang menarik untuk dibahas. Yakni fenomena *incumbent*. Fenomena ini muncul dalam pemilu untuk memenangkan seseorang yang masih menjabat dan mencalonkan kembali dalam pemilu. Selain karena ingin menguasai pemerintahan untuk yang kedua kalinya calon *incumbent* biasanya juga ingin mempertahankan popularitasnya di kalangan masyarakat.

Dalam pemilu atau pilkada, calon *incumbent* biasanya akan menang mudah atas lawannya karena calon *incumbent* dinilai sudah memiliki kinerja dan pengalaman dalam memimpin di periode sebelumnya bahkan calon *incumbent* juga dinilai mampu menggerakkan tokoh-tokoh informal maupun formal di daerahnya serta didukung oleh finansial yang lebih siap dibanding dengan lawannya. Calon *incumbent* juga dipandang mampu menjangkau semua segmen pemilih, berbeda dengan calon yang baru yang tentunya agak kesulitan dalam mencari dukungan dari pemilih.

Berbicara tentang calon *incumbent*, Desa Balong tahun depan yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa juga memiliki calon kepala desa *incumbent* yang akan mencalonkan kembali dalam pilkades. Segala persiapan untuk pelaksanaan pilkades Desa Balong terus dipersiapkan panitia pemilihan kepala desa mulai dari pendaftaran calon kepala desa dan berlanjut ke tahap selanjutnya sampai nanti hari pelaksanaan pencoblosan.

Seperti yang sudah dibahas, pada pemilihan kepala desa tahun 2019, desa Balong memiliki 2(dua) calon kepala desa yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1(satu) di desa Balong. Satu calon petahana atau *incumbent* yang akan maju lagi sedangkan yang menjadi lawan ialah 1(satu) calon baru yang akan ikut bersaing dalam pilkades. Dalam menghadapi pilkades tahun 2019 kedua calon pasti mempunyai strategi dan cara untuk memenangkan pilkades tersebut.

Segala cara pasti akan dilakukan mengingat persaingan dengan lawannya diprediksi bakal sengit. Biasanya calon kepala desa ketika mendekati pilkades akan menggunakan berbagai upaya strategi bahkan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan suara atau menarik masyarakat agar dapat memilihnya. Tak terkecuali bagi calon kepala desa *incumbent* yang akan maju mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa pastinya juga akan menggunakan strategi kemenangan pilkades untuk mempertahankan kekuasaannya.

Karena masalah ini menarik untuk dibahas, maka hal ini akan diteliti oleh penulis. Penulis tertarik ingin mengetahui apakah strategi politik yang diterapkan calon kepala desa *incumbent* dalam menghadapi pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Balong.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi politik yang dilakukan calon kepala desa *incumbent*?

2. Apa saja modalitas politik yang harus dimiliki oleh calon kepala desa incumbent dalam melaksanakan strategi politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diambil tujuan penelitian seperti berikut:

1. Mengetahui dan memahami strategi politik yang dilakukan calon kepala desa incumbent
2. Mengetahui dan memahami modalitas politik calon kepala desa incumbent dalam melaksanakan strategi politik.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Untuk Desa dan Masyarakat

Bagi desa diharapkan untuk digunakan sebagai masukan bagi jajaran pemerintah di tingkat desa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong dan penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber kajian tentang politik di daerah pedesaan terlebih pada saat adanya Pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Untuk Penulis

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman penulis dan menambah pengalaman terhadap berbagai masalah politik yang terjadi di masyarakat.

3. Manfaat untuk Universitas

Untuk dapat dijadikan bahan referensi atau kajian kepustakaan dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain tentang ilmu politik di lingkup Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.